

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Perstilah dan Pengertian Pendidikan IPS

Menurut Somantri (2001: 101), istilah IPS muncul pada Tahun 1975-1976, yaitu pada saat penyusunan Kurikulum Pendidikan PSP, yaitu sebuah "label" untuk mata pelajaran Sejarah, ekonomi, geografi dan mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Untuk pendidikan dasar dan menengah, istilah ini dimaksudkan pula untuk mendampingi "label" nama IPA untuk mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika untuk tingkat pendidikan menengah. Istilah IPS dan IPA ini juga dimaksudkan untuk membedakannya dengan nama-nama disiplin ilmu di Universitas.

Dalam perkembangan selanjutnya, masih menurut Somantri, nama IPS dan IPA beranjak menjadi pengertian *"suatu mata pelajaran yang menggunakan pendekatan 'integrasi' dari beberapa mata pelajaran, agar pelajaran itu lebih mempunyai arti bagi peserta didik serta untuk mencegah tumpang tindih"*.

Selain itu, karena istilah IPS ini merupakan sub program pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, maka lahirlah *Pendidikan IPS* (dan Pendidikan IPA). Istilah ini adalah penegasan dan akibat dari istilah IPS-IPA saja agar bisa dibedakan dengan pendidikan tinggi di Universitas. Namun, menurut Al Mukhtar (1991: 47), mata pelajaran ilmu-ilmu sosial sendiri, sudah ada jauh sebelum digunakan istilah IPS seperti yang terdapat dalam kurikulum 1962 dan kurikulum 1968.

Istilah lain yang muncul selain dari nama Pendidikan IPS ini adalah Studi Sosial. Istilah ini diperkenalkan di Indonesia pada Tahun 1971, pada Seminar

Nasional Civics Education di Tawangmangu – Solo, sebagai terjemahan dari istilah “Social Studies” yang telah digunakan di Amerika untuk mata pelajaran ini dalam kurikulum Sekolahnya (Al Mukhtar, 1991: 48). Kendatipun istilah ini tidak dijadikan nama bagi Pendidikan IPS, namun menurut Suwama, istilah ini terus berkembang sebagai sebutan konseptual dalam pembaharuan pendidikan IPS yang secara operasional lebih berperan sebagai “pendekatan dalam pengembangan kurikulum Pendidikan IPS di Indonesia.

Nama-nama lainnya yang identik dengan penamaan Pendidikan IPS (PIPS) dan Studi Sosial ini masih menurut Al Mukhtar (2001; 24-49), adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Ilmu Sosial (PIS), dan Ilmu Sosial Dasar (ISD). Setiap istilah yang digunakan, merupakan cerminan dari dasar pemikiran serta visi, misi dan arah pengembangannya, terutama tujuan dari setiap program. Namun, secara umum orang mengidentikkan IPS dan PIPS adalah sebutan untuk program pendidikan IPS di tingkat dasar dan menengah, sedangkan Studi Sosial, Pendidikan Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Dasar, adalah nama-nama untuk program pendidikan yang biasa dilaksanakan di tingkat Perguruan Tinggi.

Sekalipun diajarkan di tingkatan yang berbeda, namun dua-duanya tetap mempunyai kesamaan, yakni sama-sama berbasiskan ilmu sosial, sedangkan perbedaannya terdapat dalam segi kedalaman dan keluasan isi materi, serta tujuan akhir dilaksanakannya program tersebut.

Perbandingan pendidikan IPS untuk tingkat Dasar dan Menengah dan di Perguruan Tinggi, digambarkan oleh Somantri (2001; 103) sebagai berikut :

Pendidikan IPS untuk tingkat Dasar dan Menengah	Pendidikan IPS untuk Perguruan Tinggi
Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis psikologis untuk tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah, dalam kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila.	Pendidikan IPS adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah (dan psikologis) untuk mewujudkan tujuan pendidikan FPIPS, dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila.

Gbr. 1. Perbandingan Pend. IPS untuk tingkat Dasar & Menengah dengan di Perguruan Tinggi.

Di sekolah-sekolah Amerika sendiri yang sampai saat ini dianggap sebagai salah satu sumber utama dalam pendidikan IPS (studi sosial) di Indonesia ternyata mempunyai tiga tradisi dalam memandang (pendekatan) pendidikan IPS untuk proses pembelajaran di tingkat pesekolahannya R.D. Barr et al. dalam David T. Naylor et al. (1987; 35-37).

Pertama, ada yang memandang IPS sebagai Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang baik melalui penanaman nilai-nilai yang baik sebagai kerangka dasar pengambilan keputusan. Kedua, memandang IPS sebagai Ilmu Sosial yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik melalui pengambilan keputusan yang mendasar, dengan penguasaan konsep ilmu sosial, proses dan problem sosial. Ketiga memandang IPS sebagai Reflektif Inkuiri yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik melalui kesiapan dalam proses penelitian yang mana pengetahuan itu didapatkan dengan cara mengetahui/memahami kebutuhan-kebutuhan warga negara untuk membuat keputusan dan memecahkan permasalahannya.

Penggunaan metode pada ketiga pendekatan IPS inipun sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada pendekatan IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan, metode yang digunakannya adalah penanaman nilai dan konsep dengan teknik membaca, ceramah dan membahas tanya jawab dan contoh-contoh pemecahan masalah. Pada pendekatan IPS sebagai ilmu sosial, diserahkan pada tiap ilmu itu sendiri, karena tiap-tiap ilmu sosial tersebut mempunyai metodenya sendiri-sendiri dalam menguji pengetahuannya. Sedangkan pada pendekatan IPS sebagai Reflektif Inkuiri, metode yang digunakannya adalah memberikan kesiapan pada siswa untuk mengambil keputusan secara terstruktur dan disiplin, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan merespon konflik melalui alat tes kognitif.

Adapun mengenai isi materinya, untuk pendekatan IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan, materinya merupakan hasil seleksi yang telah ditafsirkan oleh guru dengan keahliannya yang berfungsi memaparkan nilai-nilai, sikap dan kepercayaan. Pada pendekatan IPS sebagai pendidikan ilmu sosial, materinya yang tepat adalah mengajarkan struktur, konsep, problem dan proses-proses ilmu sosial. Sedangkan pada pendekatan IPS sebagai reflektif inkuiri materinya adalah menganalisis nilai-nilai individual warga negara serta masalah-masalah sosial yang timbul. Gambaran keseluruhan mengenai hal di atas secara skematis, bisa dilihat dihalaman berikut ini. :

Gambar 2.

The Three Social Studies Tradition

SOCIAL STUDIES TEACHING TRADITION BY CONVISSION	SOCIAL STUDIES TEACHING TRADITION BY DISCOVERY	SOCIAL STUDIES TEACHING TRADITION BY REFLECTIVE INQUIRY
<b>Purpose</b> Citizenship is best promoted by inculcating right values as a framework for making decisions	Citizenship is best promoted by decision making based on mastery of social science concepts, processes and problems.	Citizenship is best promoted through a process of inquiry in which knowledge is derived from what citizens need to know to make decisions and solve problems.
<b>Method</b> Transmission : Transmission of concepts and values by such techniques as textbook, recitation, lecture, question and answer sessions, and structured problem solving exercises.	<b>Discovery:</b> Each of the social sciences, has its own method of gathering and verifying knowledge. Students should discover and apply the method that is appropriate to each social science	<b>Reflective inquiry :</b> Decision making is structured and discipline through a reflective inquiry process which aims at identifying problems and responding to conflict by means of testing insights.
<b>Content</b> Content is selected by an authority interpreted by the teacher and has the function of illustrating values, beliefs, and attitudes	Proper content is the structure, concepts, problems, and processes of both the separate and the integrated social science disciplines.	Analysis of individual citizen's values yields needs and interests which, in turn, form the basis for student self selection of problems. Problems, therefore, constitute the content for reflection.

SOURCE : From R.D. Barr, J.L. Barth, and S. Sherris, *Defining the Social Studies*, Bulletin 51, 1977. Reprinted with permission of the National Council for the Social Studies in David T. Naylor et al. (1987; page 35-37)

Di Indonesia, terutama di tingkat dasar dan menengah tradisi pendidikan IPS sebagai pendidikan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan nilai-nilai warga negara yang baik tampaknya lebih mendominasi dibandingkan dengan dua tradisi pendidikan IPS lainnya.

Lalu apa sebenarnya pengertian dari Pendidikan IPS itu sendiri ? Banyak ahli telah mencoba merumuskan pengertian dari Pendidikan IPS ini. Muljono Tj. (1980; 3-5) mencoba merangkum berbagai definisi dari Pendidikan IPS itu sbb. :

1. The Committee on the Social Studies of the National Education Association's and Reorganisation of Secondary Education in 1916; Those (studies) whose subject matter relates to the organisation and development of human society and to man as member of Social Group (Arthur; C. Binning & David H. Binning, Teaching the Social Studies in secondary school, 1952, New York)
2. Kenworthy, mengatakan bahwa : Social studies the study of people carried in other to help students understand themselves and others in a varieties of societies in different places and at different times as individual and group seek to meet the needs through many institutions as those human beings search for satisfying a personal philosophy and the good society.
3. William B; Modern Elementary Curriculum, Holt & Co, New York 1960, mengatakan : The Social studies are concerned with the wide dissemination of information, the development of social skill and the improvement of social behaviour.  
The social studies program draws materials from the various social sciences, but it also users materials from the local community that can not be properly clasified as belonging axclusively to any of them.
4. U.S. Burreau of Education ( The Social Studies in Secondary Education ) menyatakan; The social studies are understand to be those whose subject matter relates directly to the organization and development of human society and to man as a member of a social group.

Mathis (1973: 20) mengartikan PIPS sebagai "The Study of man is society in the past, present and future. Social studies emerges as a subject of prime importance for study in the school".

Wesley (1952: 9) mengartikannya sebagai "Those portions or aspects of the social sciences that have been selected and adapted for use in the school or in other instructional situation".

Jarolimek (1967: 4) mengartikannya sebagai "as a part of the elementary school curriculum draw subject-matter content for the social science, history, sociology, political science, social psychology, philosophy, anthropology and economic. The social studies have been defined as 'those portion of the social science... selected for instructional purposes'".

Somantri dalam bukunya *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (2001: 73, 92 dan 103), juga mencatat beberapa definisi dari Pendidikan IPS ini, termasuk menurut Somantri sendiri adalah sebagai berikut :

1. Menurut National Commission on Social Studies (NCSS) :  
The term social studies is used to include history, economics, antropologi, sosiologi, civics, geography and all modifications of subjects whose content as well as aim is social. In all content definitions, the social studies is conceived as the subject matter of the academic disciplines somehow simplified, adapted, modified, or selected for school instruction.
2. Menurut Somantri :
  - a. Suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis, untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
  - b. Penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis, untuk tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah, dalam kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila
3. Menurut Rumusan Forum Komunikasi II HISPIPSI Tahun 1991 versi pendidikan dasar dan menengah :  
Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.
4. Menurut versi IPS jurusan Pendidikan IPS :  
Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin-disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.

Sedangkan Djahiri dalam bukunya Pengajaran Studi Sosial / IPS (1983: 2)

mengartikan Pendidikan IPS sebagai :

Ilmu Pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya, serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik, untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. Jadi, IPS atau Studi Sosial konsep-konsepnya merupakan konsep pilihan berdasarkan kriteria tertentu dari berbagai ilmu, lalu dipadu dan diolah secara didaktis pedagogis kearah kecocokannya dengan siswa, baik aspek pribadi maupun aspek sosial serta ekologisnya.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa betapapun secara redaksional pengertian Pendidikan IPS itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun dilihat dari substansinya, tampak jelas bahwa pengertian-pengertian itu mempunyai substansi yang sama. Namun demikian, untuk ditingkat pendidikan dasar dan menengah Indonesia, rumusan Forum Komunikasi II HISPIPSI Tahun 1991 versi pendidikan dasar dan menengah tampaknya lebih cocok dianut di Indonesia.

## **B. Hakikat dan Tujuan Pendidikan IPS**

Berbicara tentang hakikat Pendidikan IPS berarti kita akan membicarakan tentang inti dari Pendidikan IPS itu sendiri. Beberapa ahli dalam bidang Pendidikan IPS telah mengemukakan pendapatnya tentang inti dari Pendidikan IPS itu. Namun, seperti halnya juga pengertian dari PIPS, uraian tentang hakikat dari Pendidikan IPS ini ternyata juga mempunyai kesamaan substansi, yakni bahwa hakikat dari pendidikan IPS itu tiada lain adalah untuk membentuk warga negara yang baik. yang dapat menjalani hidup dan kehidupannya secara baik dan benar, baik secara individu



maupun secara sosial dengan menguasai berbagai keterampilan dalam dirinya.

Jarolimek (1993: 5) misalnya menggambarkan hakikat dari pendidikan IPS itu secara umum sebagai berikut :

The major mission of social studies education is to help children learn about the social world in which they live and how it got that way; to learn, to cope with social realities; and to develop the knowledge, attitudes and skills needed to help shape and enlighten humanity. Social studies focuses specifically on citizenship education, which means learning to participate in group life. The outer edges of that participation for today's child is the global community.

Banks (1990: 3) dalam bukunya *Teaching for The Social Studies* mengartikan hakikat Pendidikan IPS sebagai berikut :

The Social Studies is that part of the elementary and high school curriculum which has the primary responsibility for helping students to develop the knowledge, skills, attitudes, and values needed to participate in the civic life of their local communities, the nation, and the world. While the other curriculum areas also help students to attain some skills needed to participate in a democratic society, the social studies is the only area that has the development of civic competencies and skills as its primary goal.

Sedangkan menurut Djahiri (1983; 2), hakikat IPS dipandang dari sudut anak didik adalah :

Sebagai pengetahuan yang akan membina para generasi muda belajar ke arah :

- a. melanjutkan pengurusan masyarakat yang bebas yang telah mereka warisi.
- b. mengadakan perubahan-perubahan kearah kondisi yang diinginkan oleh dunia moderen atau menurut daya kreasi pembangunan serta prinsip-prinsip dasar dan sistem nilai yang dianut masyarakat yang bersangkutan
- c. membina kehidupan masa depan masyarakatnya secara lebih cemerlang dan lebih baik untuk kelak diwariskan kepada turunannya secara lebih baik dan memuaskan.



Jadi, jika dilihat dari beberapa pengertian IPS di atas, apapun pengertian IPS itu, bagaimanapun proses tahapan pendidikan itu berlangsung, dan siapapun yang mendapatkan pendidikan IPS itu, pada akhirnya pasti akan bermuara pada pembentukan warga negara yang baik seperti yang diinginkan bangsa dan negaranya.

Lalu bagaimana dengan Tujuan Pendidikan IPS itu sendiri ? Tujuan Pendidikan IPS di tingkat persekolahan menurut Somantri (2001: 260) terbagi dalam empat pendapat, yakni :

1. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan IPS di sekolah ialah untuk mendidik para siswa menjadi ahli ekonomi, politik, hukum, sosiologi dan pengetahuan lainnya. Menurut faham ini, kurikulum pengajaran IPS harus diorganisasikan secara terpisah-pisah sesuai dengan *body of knowledge* masing-masing disiplin ilmu sosial tersebut.....
2. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan IPS di sekolah ialah untuk menumbuhkan warga negara yang baik. Pendidikan di sekolah harus merupakan "*a unified coordinated holistic study of men in living societies*" (Hanna, 1962: 63). Menurut faham ini, sifat warga negara yang baik akan lebih mudah ditumbuhkan pada siswa apabila guru mendidik mereka dengan jalan menempatkannya dalam konteks kebudayaannya daripada memusatkan perhatian pada disiplin ilmu sosial yang terpisah-pisah seperti dilakukan di universitas.....
3. Pendapat ketiga yang merupakan kompromi dari dua pendapat di atas. Golongan ini mengakui kebenaran masing-masing golongan tersebut. Karena itu, organisasi bahan pelajaran harus dapat menampung tujuan para siswa yang akan meneruskan pendidikannya ke universitas maupun yang akan terjun langsung ke masyarakat. Tujuan program pendidikan IPS dengan demikian akan merupakan 'simplifikasi dan distilasi' dari berbagai ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pendidikan' (Wesley, 1964: 3). Dengan demikian, tujuan pendidikan IPS di sekolah akan merupakan '*a body of predigested and organized knowledge... storehouse of knowledge, skills, specific virtues, the presumed product of research in the social sciences, to be transmitted to the student*' (Gross dan Zeleny, 1958: 32).....
4. Golongan keempat berpendapat bahwa pendidikan IPS di sekolah dimaksudkan untuk mempelajari bahan pelajaran yang sifatnya 'tertutup' (*closed areas*). Maksudnya ialah bahwa dengan mempelajari bahan pelajaran yang pantang (tabu) untuk dibicarakan, para siswa

akan memperoleh kesempatan untuk memecahkan konflik intrapersonal maupun antar-personal. Bahan pelajaran IPS yang tabu tersebut dapat timbul dari bidang ekonomi, politik, sejarah, sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan mempelajari hal-hal yang tabu, para siswa akan memperoleh banyak keuntungan, yaitu :

- a. dapat mempelajari masalah-masalah sosial yang perlu mendapatkan pemecahannya;
- b. sifat pengajaran akan mencerminkan suasana yang mengarah pada prospek kehidupan yang demokratis.
- c. dapat berlatih berbeda pendapat, suatu hal yang sangat penting dalam memperkuat asa demokratis
- d. bahan yang tabu seringkali sangat dekat kegunaannya dengan kebutuhan pribadi maupun masyarakat.....

Untuk kondisi Indonesia, terutama Pendidikan IPS di tingkat dasar dan menengah, pendapat ketiga nampaknya lebih banyak dianut oleh para pakar dan pendidik kita, sekalipun pendapat kesatu tidak diabaikan sama sekali. Sebab di Indonesia Pendidikan IPS memang tidak dimaksudkan untuk menjadi ahli atau ilmuwan sosial, melainkan dididik untuk menjadi warga negara yang baik, punya keterampilan sosial yang tinggi, mandiri dan dapat menjalani hidup dan kehidupannya di masa kini dan masa datang. Sekalipun demikian, untuk ditingkat menengah, materi dan konsep-konsep ilmu sosial memang sudah diajarkan lebih mendalam lagi terutama di kelas tiga jurusan IPS, yang mendapatkan pelajaran Sosiologi, Antropologi, Ekonomi/Akuntansi dan Tata Negara. Hal ini tidak lain diantaranya adalah untuk mempersiapkan mereka juga yang berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi yang akan mendidik mereka menjadi calon-calon ilmuwan sosial.

Fenton (1967), mengemukakan tujuan Pendidikan IPS sebagai "Prepare children to be good citizens, social studies teach children how to think, social studies pass on the cultural heritage".

Clark (1973) mengemukakan bahwa titik berat studi sosial adalah :

Perkembangan individu agar dapat memahami lingkungan sosialnya, serta manusia dengan kegiatan dan interaksi antara mereka, dan anak didik diharapkan agar dapat menjadi anggota yang produktif dan dapat memberikan andilnya dalam masyarakat yang merdeka, mempunyai rasa tanggung jawab, tolong menolong sesamanya, dan dapat mengembangkan nilai-nilai dan ide-ide dari masyarakatnya.

Hasan (1996; 98) dalam bukunya Pendidikan Ilmu Sosial menyatakan bahwa :

Tujuan pendidikan ilmu-ilmu sosial dikelompokkan kedalam tiga katagori, yaitu pengembangan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tujuan pertama berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri siswa dan kepentingan ilmu, tujuan kedua, berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat. Sedangkan tujuan ketiga, lebih berorientasi kepada pengembangan pribadi siswa, baik untuk kepentingan dirinya, masyarakat maupun ilmu.

Al Mukhtar dalam bukunya Epistimologi Pendidikan IPS (2001: 33)

mengatakan bahwa tujuan dari Pendidikan IPS ini adalah :

Untuk mengembangkan kemampuan baik intelektual maupun emosional siswa untuk dapat memahami dan memecahkan masalah sosial dalam rangka memperkuat partisipasi warga negara dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut rumusan National Commission on Social Studies in The Schools (NCSS), dalam bookletnya yang diterbitkan November Tahun 1989 (cetakan pertama) halaman 6 menyatakan bahwa :

The Social Studies Curriculum should enable students to develop :

1. Civic responsibility and active civic participation.
2. Perspectives on their own life experiences so they see themselves as part of the larger human adventure in time and place.
3. A critical understanding of the history, geography, economic, political and social institutions, traditions, and values of the United States as expressed in both their unity and diversity.

4. An understanding of other peoples and the unity and diversity of world history, geography, institutions, traditions and values.
5. Critical attitudes and analytical perspective appropriate to analysis of human condition.

Jadi jika kita kaji, bagaimanapun rumusan tujuan IPS itu, pada akhirnya pasti akan bermuara pada pengembangan potensi fikir, emosi dan keterampilan siswa agar ia dapat memahami diri dan lingkungannya agar menjadi warga negara yang baik dan dapat diandalkan negaranya.

### **C. Hubungan Pendidikan IPS dengan Ilmu-Ilmu Lain**

#### **1. Hubungan Pendidikan IPS dengan Ilmu-Ilmu Sosial**

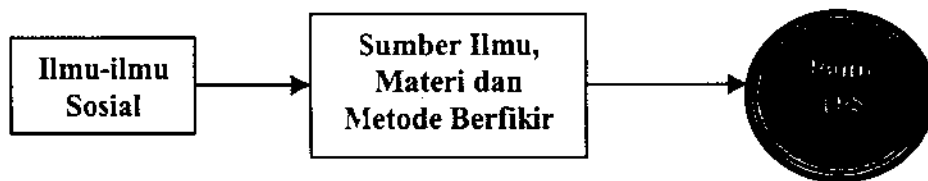
Ilmu-ilmu sosial menjadi sumber ilmu bagi program pendidikan IPS dalam mengembangkan materi-materi pembelajarannya di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kedudukan ilmu sosial dalam kaitannya dengan pendidikan IPS, menempatkan ilmu sosial sebagai sumber keilmuan dan bahan materi sajian pendidikan IPS. Jadi hubungan keduanya bersifat material (Al Mukhtar, 1991:58). Implikasinya menurut Suwama, jika lemah penguasaan dari konsep-konsep disiplin ilmu sosial, maka akan lemah pula potensi/kemampuan pengembangan pendidikan IPS-nya. Hal yang sama telah dirumuskan dalam Forum Komunikasi II HISPIPSI Tahun 1991 di Jogjakarta (Somantri, 2001; 92) menurut versi pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tuuan pendidikan.

Hal senada, diungkapkan pula oleh Al Mukhtar (1999; 62) dalam artikel ilmiahnya yang dimuat dalam majalah ilmiah Forum Pendidikan IKIP Padang Nomor 01 Th. XXIV-1999 dan bukunya yang berjudul Epistemologi Pendidikan IPS (2001: 14), yang menyatakan bahwa :

Pendidikan IPS menempatkan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu sosial sebagai sumber keilmuan, sumber materi (teori, konsep, dan generalisasi) disamping sumber kemasyarakatannya yang memungkinkan ada keterpaduan antara dimensi teoritik dengan realitas dalam kehidupan masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas sudah bahwa ilmu sosial adalah salah satu isi materi yang akan disampaikan kepada anak didik disamping ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu humaniora dan yang lainnya.

Hubungan antara keduanya tersebut, secara skematis dapat digambarkan sbb. :



**Gambar 3.** Hubungan antara Pendidikan IPS dengan Ilmu-Ilmu Sosial.

## **2. Hubungan Pendidikan IPS dengan Ilmu Pendidikan**

Pendidikan IPS sebenarnya sangatlah unik, demikian kata Somantri (2001: 88), sebab seperti yang dikatakannya, ia berakar pada beberapa disiplin ilmu, serta harus direkayasa untuk mencapai tujuan pendidikan.

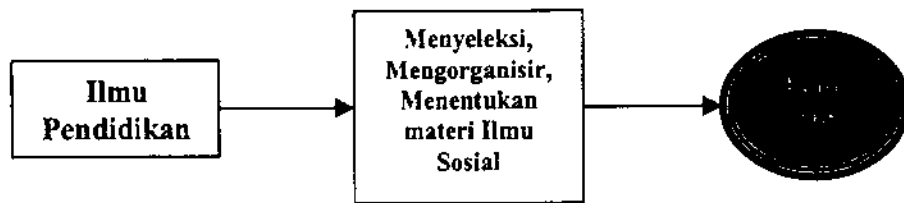
Salah satu akar dari disiplin ilmu itu ialah Ilmu Pendidikan. Ilmu ini tentu saja sangat penting bagi perkembangan IPS, karena tanpa ilmu pendidikan maka ilmu-

ilmu sosial yang merupakan sumber ilmu atau materi IPS ini tidak bisa diorganisir, direkayasa untuk kepentingan pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Tanpa ilmu pendidikan, maka proses pembelajaran di tingkat dasar dan menengah itu menjadi pendidikan ilmu sosial dan bukan pendidikan IPS. Tanpa ilmu pendidikan, maka kita tidak akan mengerti bagaimana keadaan psikologis anak dalam menerima materi-materi tersebut. Kita juga tidak akan mengerti materi-materi apa saja yang dibutuhkan anak dalam kehidupannya yang sekarang maupun kelak. Kita juga tidak akan mengetahui seberapa banyak dan dalamnya suatu ilmu sosial yang ada di tingkat pendidikan menengah ke bawah harus dipelajari oleh seorang anak.

Sumber dan proses pemilihan bahan IPS, menempatkan ilmu pendidikan sebagai sumber keilmuan, sehingga dapat terseleksi secara tepat bahan tersebut, demikian menurut Suwarma (2001: 14).

Dalam pemilihan materi menurut Hasan (1996: 14), maka pendidikan IPS di jenjang persekolahan melakukan pemilihan yang sangat berorientasi kepada kepentingan pendidikan, bukan pada keilmuan semata. Pertimbangan keilmuan digunakan dalam melihat apakah ruang lingkup materi sudah cukup, validitas materi yang dipilih, serta tata urutan materi dalam kurikulum. Adapun bagaimana materi itu dikuasai, sangat tergantung pada pendidikan yang dianut. Tetapi cara menguasai materi itu sangat kuat berorientasi pada teori pendidikan yang ada, proses pemahaman suatu materi seperti yang dikembangkan dalam psikologi belajar, dijadikan landasan mengembangkan proses belajar.

Secara skematis, hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.: Hubungan antara Ilmu Pendidikan dan Pendidikan IPS

### 3. Hubungan antara Pendidikan IPS dengan Ilmu-ilmu Humaniora

Beberapa pakar dari Barat mengatakan, bahwa ilmu itu adalah bebas nilai ilmu selalu berdiri sendiri dan tidak pernah dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah ilmu-ilmu sosial yang merupakan salah satu akar keilmuan Pendidikan IPS. Lebih jauh bahkan mereka berani berpendapat bahwa akal manusialah yang harus didahulukan dibandingkan dengan agama, *intellectus quaerens fidem* kata mereka (Somantri, 2001: 50).

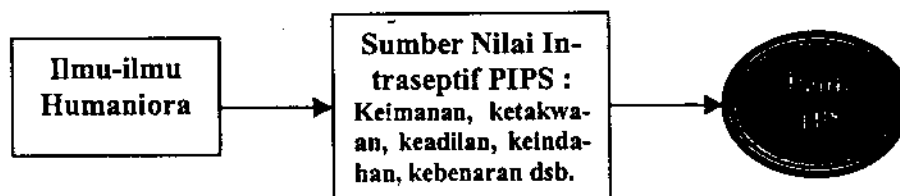
Namun sejarah perkembangan peradaban manusia mencatat bahwa peradaban yang mengagungkan kredo keilmuan seperti di atas telah menghasilkan ratusan bahkan ribuan peperangan, kekerasan sipil, dan menyebabkan pula kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan karena pemerasan manusia satu oleh manusia lainnya (Somantri, 2001: 52).

Bercermin pada budaya yang medewakan *supremacy of reason* serta merasakan dampak dari masyarakat yang mendewakan ilmu, landasan dan tujuan pendidikan nasional Indonesia tidak mengikuti tumbuhnya kredo keilmuan itu semata-mata, tetapi berusaha menumbuhkan secara serempak (istilah Somantri, 2001: 50) pengetahuan *extrareceptive knowledge* dan pengetahuan *intrareceptive knowledge* dalam harmoni.



Tujuan pendidikan nasional memahami kelemahan kelompok yang hanya memuja kredo keilmuan tersebut. Alasannya ialah bahwa disamping ada kebenaran ilmiah, ada juga kebenaran iman yang termasuk dalam kelompok pengertian pengetahuan intraseptif, yaitu pengetahuan dari dalam batin manusia yang dianggap adil, benar dan indah. Keyakinan dan keimanan dirasakan sebagai pengetahuan yang riil dan benar serta merupakan motivasi yang kuat bagi perilaku manusia. Iman, takwa, Pancasila dan nilai-nilai 1945 adalah pengetahuan intraseptif yang dianggap benar dan sudah terbukti kebenarannya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sudah diuji tingkat kebenarannya dalam sejarah politik bangsa Indonesia. Demikian pula nilai-nilai 1945 telah memberi motivasi untuk mengusir penjajah Belanda dari Indonesia tanpa menghitung untung ruginya.

Nilai-nilai keimanan, ketakwaan, Pancasila, semangat dan nilai-nilai 1945 yang dipunyai oleh para pejuang kita dahulu itu, kemudian ditanamkan kepada siswa selaku generasi penerus bangsa melalui pendidikan IPS di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jika digambarkan hubungan itu secara skematis, maka akan didapat gambaran sebagai berikut :



**Gambar 5.** Hubungan Pend. IPS dengan Ilmu-ilmu Humaniora

#### 4. Hubungan Pendidikan IPS dengan Ilmu-ilmu Alam (IPA/Eksak)

Hubungan yang terjadi antara pendidikan IPS dengan pendidikan IPA selama ini hanyalah sebatas metodologi berfikir dan metode penelitian. Itupun saat ini kembali dipertanyakan terutama tentang metodologi penelitian ilmu alamnya. Sebab belakangan banyak berkembang pemahaman, bahwa metodologi penelitian ilmu sosial tidak bisa disamakan dengan metodologi penelitian eksak, sebab objek kajiannya pun berbeda, yang satu objeknya adalah benda-benda mati (alam) yang dapat dikuasai dan diamati langsung dengan tanpa reaksi. Sedangkan ilmu sosial objeknya adalah makhluk hidup yang dapat bereaksi, berinteraksi bahkan berubah sikap karena punya daya cipta, rasa dan karsa. Penelitian sosial tidak selalu bisa digeneralisir seperti halnya dalam ilmu eksak. Dalam penelitian eksak, jika objek yang ditelitinya itu diberi perlakuan yang sama, maka hasilnya akan tetap sama dimanapun ia berada. Dalam ilmu sosial tidaklah demikian, karena potensi-potensi fikir, mental, pengalaman seseorang, kondisi sosial budaya, nilai-nilai yang berlaku dan dianut akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Namun harus diakui bahwa metodologi penelitian kealaman sampai sekarang masih tetap ada pengaruhnya pada metodologi penelitian sosial. Hal ini terbukti dengan masih kuatnya pemahaman positivistik yang mencoba memahami objek sosial secara hitam putih, meneliti dan menanyai sekumpulan orang yang pertanyaan (angket) nya kita desain sedemikian rupa sehingga mereka harus memberikan alternatif jawaban seperti yang kita inginkan dengan hampir tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk memberikan jawaban versi mereka agar dapat

dikuantifikasikan. Contoh ilmu sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh metodologi kealaman dalam penelitiannya adalah ilmu psikologi dan sosiologi.

Manuel Kaisepo dalam Al Mukhtar (2001: 72) mengutip perkataan Ignas Kleden tentang perbedaan keduanya. Perbedaan pokok antara alam dan individu atau kelompok sosial yaitu bahwa alam adalah objek, karena itu dapat dikuasai sehabis-habisnya. Sedangkan individu atau kelompok adalah subjek dengan kebebasan, kehendak, pikiran dan cita-citanya sendiri. Maka pandangan tentang sesuatu kelompok sosial akan sangat bergantung dari anggapan tentang apakah sebagai objek atau subjek, maka akan dilakukan hanyalah observasi terhadap kelompok tersebut untuk diperoleh informasi atau data tentang objek. Sebaliknya kalau dianggap subjek, maka ia akan melakukan komunikasi, dan dengan komunikasi itu hendak dicapai suatu inter-subyektivitas tertentu dengan suatu kelompok sosial yang akan memungkinkan pemahaman dan pengertian tingkah laku dan hubungan-hubungan dalam kelompok sosial tersebut terutama melalui "interpretation of meaning".

Secara skematis, keterhubungan itu bisa digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 6.** Hubungan Pend. IPS dengan Ilmu-ilmu Eksakta



#### D. PPKN Sebagai Bagian dari Tujuan Pendidikan IPS

Dilihat dari segi materi dan tujuan pembelajarannya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bagian atau salah satu tujuan Pendidikan IPS, yaitu bahan pendidikannya diorganisasikan secara terpadu (integrated) dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, dokumen negara, terutama Pancasila, UUD'45, GBHN dan perundangan negara, dengan tekanan, bahan pendidikan pada hubungan warga negara dengan negara dan bahan pendidikan yang berkenaan dengan bela negara (Soamantri; 2001: 161).

Pernyataan ini sangat sesuai dengan pendapat para pakar lainnya. Karena seperti telah dikemukakan di depan, secara umum, tujuan dari diadakannya pendidikan IPS ini adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab

Di Indonesia, pembentukan warga negara yang baik yang berkarakter ke-Indonesiaan ini telah dibebankan khususnya kepada mata pelajaran PPKn. Hal ini telah diisyaratkan oleh UU No. 2/1989 pasal 39 (2) yang dalam penjelasannya menyatakan :

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan, di atasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara teoritik keilmuan, Djahiri (1994: 1) juga menyatakan sebagai berikut

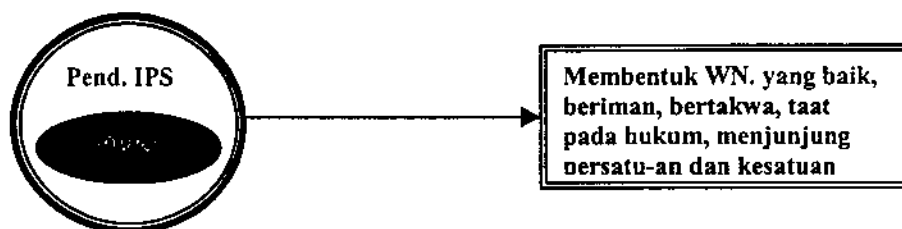
Target harapan dan isi utama PPKn adalah memanusiakan dan mendewasakan serta membudayakan anak manusia (siswa) secara utuh paripurna berdasarkan nilai, moral dan norma Pancasila, agama dan budaya luhur bangsa Indonesia; sehingga dikelak kemudian hari akan hidup suatu generasi "Manusia Indonesia Pancasila Sejati" dalam tatanan kehidupan budaya Pancasila.

Sedangkan menurut GBPP PPKn Tahun 1994, dalam melaksanakan GBPP PPKn ini, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh para pelaksana pendidikan di lapangan, yakni :

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, membina tatanan nilai moral Pancasila secara utuh, bulat dan berkeseimbangan sebagai falsafah idiil, dasar ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan perjanjian luhur.
- 2) Sesuai dengan prinsip di atas, maka GBPP mata pelajaran PPKn selalu berupaya membina keutuhan, kebulatan, kesinambungan dalam wujud pembinaan konsep nilai moral Pancasila, sehingga terbentuk manusia Indonesia seutuhnya yang serasi, selaras dan seimbang dalam kehidupan pribadi berbangsa dan bernegara.
- 3) Mata Pelajaran PPKn sebagai suatu wahana membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku yang didasari nilai luhur Pancasila ...

Dari uraian di atas, kita dapat menarik benang merah hubungan antara keduanya, yakni bahwa keduanya sama-sama bertugas menciptakan dan membentuk manusia-manusia (warga negara) yang taat pada negaranya berdasarkan filsafat, dasar negara dan sistem yang ada pada negara tersebut.

Hubungan ini kemudian bisa digambarkan dalam sebuah bagan di halaman sebelah ini yang secara secara skematis digambarkan sebagai berikut :

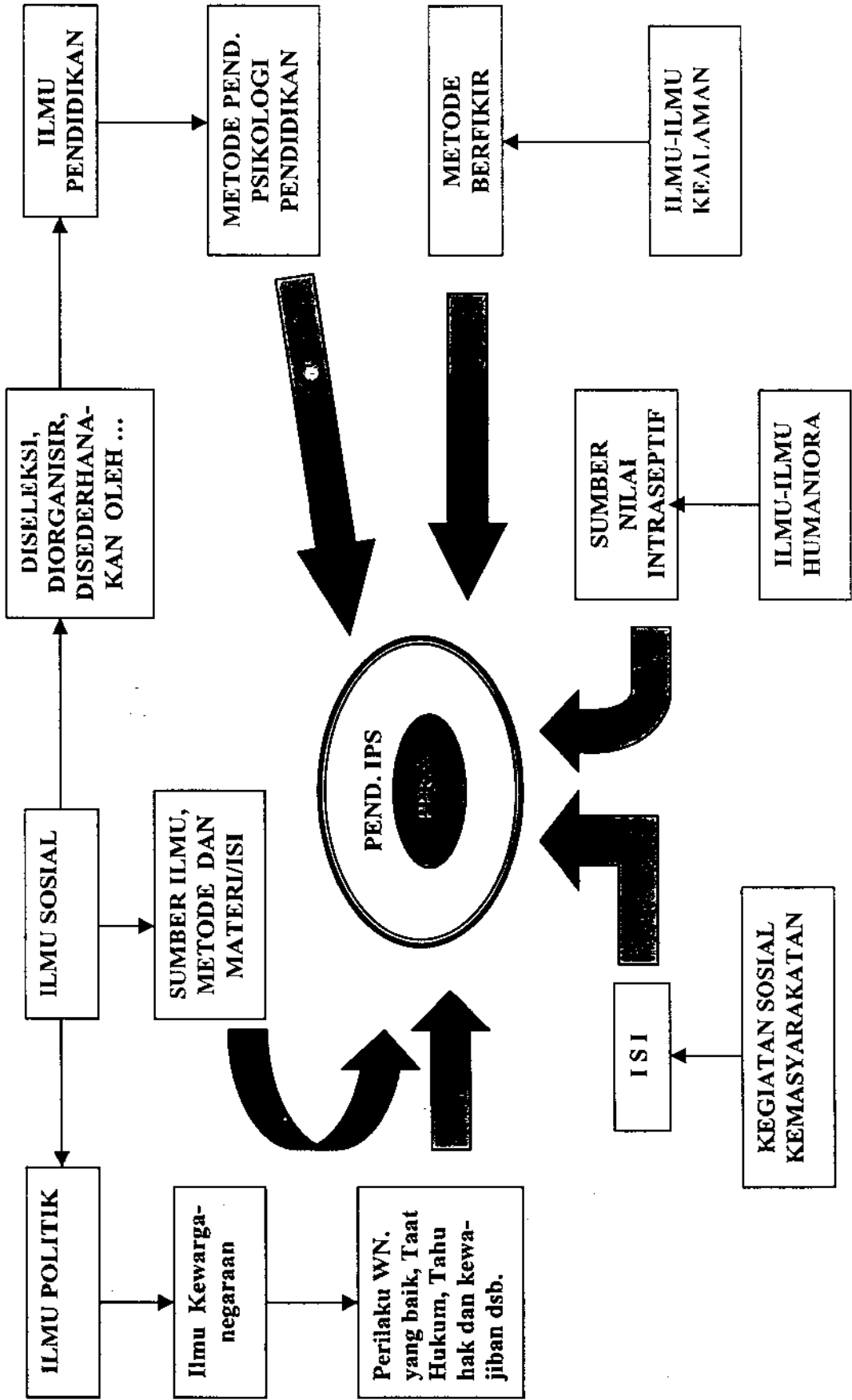


**Gambar 7.** Hubungan Pendidikan. IPS dan Pendidikan. PKN

Gambar skema hubungan di atas yang menempatkan PPKn ditengah, tentunya hanya untuk di Indonesia. Sedangkan untuk di Amerika Serikat, boleh jadi penempatan yang ditengah itu adalah mata pelajaran Civics.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif lagi tentang hubungan antara Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan IPS dan ilmu-ilmu yang sudah diuraikan di atas tersebut (ilmu eksak, ilmu pendidikan, ilmu sosial dan ilmu humaniora) penulis coba gambarkan bagan secara skematis di halaman berikut ini : →

Gambar 8. Gambaran Umum Hubungan Pendidikan IPS dengan Ilmu-Ilmu Lain Secara Skematis



## E. Pengertian dan Tujuan Pendidikan PKn di Indonesia

Menurut Somantri (2001: 298), di Indonesia ada yang menerjemahkan istilah civics dengan pengetahuan kewarganegaraan (kurikulum SD 1968: 14) dan Ilmu Kewarganegaraan. Sedangkan Civic Education diterjemahkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Tetapi ada juga yang menerjemahkan civics dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejarah timbulnya istilah Civics di Indonesia menurut Somantri, pertama kali ada yakni pada tahun 1957, ketika itu pada kurikulum SMP/SMA ada istilah kewarganegaraan, yakni pelajaran yang ditempelkan dalam pelajaran Tata Negara. Isinya hanya membahas tentang cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.

Pada tahun 1961 kemudian timbul istilah Civics. Istilah ini kemudian diidentikkan dengan indoktrinasi pada jaman orde lama (ini mungkin karena ada keterkaitan dengan slogan-slogan revolusioner yang dikumandangkan Bung Karno saat itu seperti Jarek, Resopim, Manipol Usdek dan sebagainya yang harus diajarkan dan menjadi bagian dari materi civics). Pada tahun 1968, istilah Civics yang dipakai disekolah-sekolah itu kemudian diganti dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan.

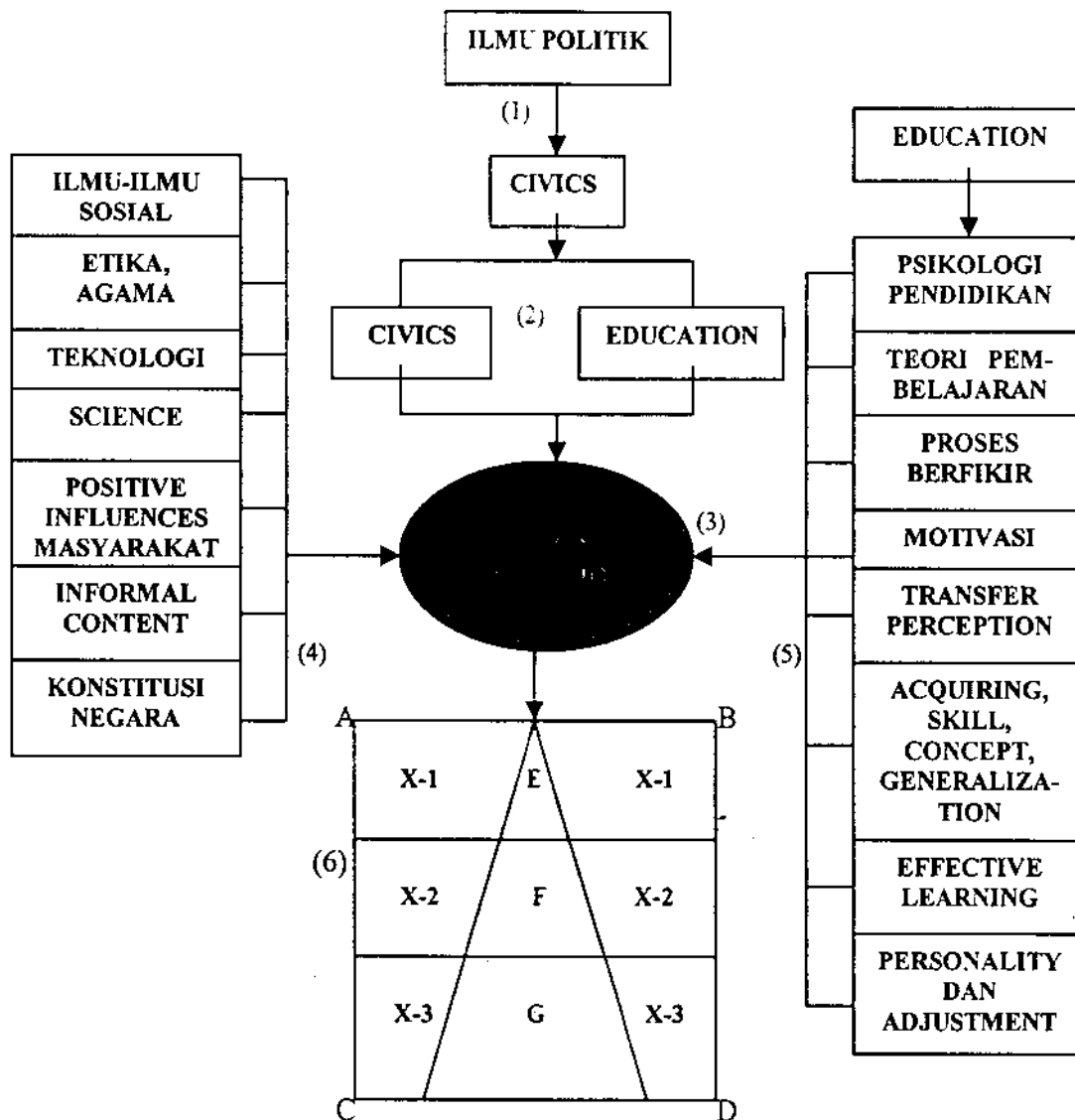
Pengertian civics sendiri di tempat asal kelahirannya Amerika ternyata berbeda dari waktu ke waktu, makin kesini makin berkembang dan meluas cakupannya. Somantri (2001; 293-296) mencoba mendeskripsikan perkembangan pengertian civics tersebut secara berurutan sebagai berikut :

1. Creshore, yang mengutip pengertian civics dari majalah Education sebagai *"the science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collection, the individual in his relation to the state"*



2. Stanley Diamond, mengartikan civics sebagai *“legal status in a country and activities closely related to the political function, voting, government organization, holding of public office, and legal right and responsibility”*.
3. Van Good, yang mengutip pengertian civics dari Dictionary of Education menyebut civics sebagai *“the element of political science or that branch of political science dealing with the rights and duties of citizens”*.
4. John Mahoney, *Civics education includes and involves those teachings, that type of teaching method, those student activities, those administrative supervisory – which the school may utilize purposively to make for better living together in the democratic way or (synonymously) to develop better civic behaviors”*.
5. Jack Allen, *“Civic education properly defined, as the product of the entire program of the school, certainly not simply of the social studies program, and assuredly not merely of a course in civics. But civics has an important function to perform. It confronts the young adolescent for the first time in his school experience with a complete of citizenship function, as right and responsibilities in a democratic context”*.
6. National Council for Social Studies (NCSS) *“Civic Education is a process comprising all the positive influences which are intended to shape a citizen’s view to his role in society. It comes partly from foemal schooling, partly from parental influence, and partly from learning outside the classroom and the home. Trough Civic Education our youth are helped to gain an understanding of our national ideals, the common good, and the process of self government”*.

Secara komprehensif Somantri (2001: 297) kemudian menggambarkan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan Civic Education itu dalam hubungannya dengan Ilmu Politik, Ilmu Kewarga Negara, Psikologi Pendidikan, Ilmu Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Agama dan sebagainya sebagai berikut (lihat Gambar 9. halaman ~~sebelah~~):



Keterangan Gambar :

- (1) Sebagian dari ilmu politik, yaitu demokrasi politik, diambil untuk pelajaran di sekolah, yang mula-mula disebut civic government, kemudian namanya menjadi pelajaran civics pada tahun 1790 (di Amerika Serikat).
- (2) Timbulnya gerakan Civic Education pada tahun 1901 yang dipelopori oleh Howard Wilson. Gerakan ini timbul karena pelajaran Civics kurang berisi kebutuhan siswa, aspek-aspek pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pada tahun 1971 Civic Education mendapat perhatian yang luar biasa di AS.
- (4) Civic Education diperkaya dengan berbagai macam sumber pengetahuan dan pengaruh-pengaruh positif dari sekolah, orang tua dan masyarakat.
- (5) Konsep-konsep psikologi pendidikan sebagai alat untuk menghidupkan Civic Education (proses edukatif)
- (6) ABCD adalah ruang lingkup civic education yang sudah diperkaya.  
 Krucut EFG adalah inti civic education yaitu demokrasi politik  
 Tanda X-1, X-2, X-3 adalah bahan-bahan dari sumber lain yang diambil untuk memperkaya civic education.  
 X-1, E, X-1 = program Civic Education untuk Sekolah Dasar.  
 X-2, F, X-2 = program Civic Education untuk SLTP.  
 X-3, G, X-3 = program Civic Education untuk SLTA.

Di Indonesia sendiri sampai saat ini masih belum begitu banyak literatur yang memuat khusus tentang pengertian dan tujuan PPKn yang merupakan terjemah dari civics di Indonesia dari para pakar pendidikan kita. Mungkin karena PPKn bukan merupakan suatu cabang dari ilmu sosial, sehingga pengembangannya masih agak sulit. Akan tetapi, salah satu pakar pendidikan ke-IPSan di Indonesia, Numan Somantri, dalam bukunya *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (2001: 159,161 dan 299) mengartikan PPKn sebagai berikut :

Pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS.

PKN merupakan bagian atau salah satu tujuan Pendidikan IPS, yaitu bahan pendidikannya diorganisasikan secara terpadu (*integrated*) dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, dokumen negara, terutama Pancasila, UUD 1945, GBHN dan perundangan negara dan bahan pendidikan yang berkenaan dengan bela negara.

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terlihat jelas disini bahwa pengertian PPKn yang dirumuskan oleh Numan Somantri mempunyai sedikit pengertian yang sama dengan Pendidikan IPS. Dalam arti, bahwa dua-duanya bukan merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri melainkan hanya sebuah program *synthetic discipline* yang sudah “diramu” dan “diolah” untuk kepentingan-kepentingan pendidikan.

Namun jika ditelaah menurut Somantri (2001: 298), Pendidikan kewarganegaraan baik di SD, SLTP maupun di SLTA, semuanya tidak lain bertujuan untuk

mengembangkan dan menumbuhkan warga negara yang baik. Isi bahan pelajarannya mengandung nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika, agama, dan kebudayaan. Pendeknya segala sesuatu yang dianggap baik oleh Pancasila, UUD 1945 dan keputusan-keputusan lembaga legislatif dan pemerintah.

**F. Arti, Kegunaan dan Langkah-langkah Penggunaan Metode Problem Solving dalam Proses Pembelajaran PPKn.**

Metode Pemecahan Masalah (*problem solving*) adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan masalah atau jawabannya oleh siswa (Sudirma dkk., 1987: 146). Permasalahan itu dapat diajukan atau diberikan guru kepada siswa, dari siswa bersama guru, atau dari siswa sendiri, yang kemudian dijadikan pembahasan dan dicari pemecahannya sebagai kegiatan pembelajaran siswa. Metode pemecahan masalah ini sering disebut pula sebagai *problem solving method*, *reflective thinking method*, atau *scientific method*.

Lalu apa sebenarnya yang disebut masalah itu ? Masalah ialah segala sesuatu yang mengandung keragu-raguan, ketidak pastian atau kesulitan yang harus dipecahkan, dikuasai dan dijinakkan (Oemar & Waney, 1980: 2). Masalah bisa juga diartikan sebagai situasi dimana beberapa informasi diketahui dan informasi lain diperlukan, atau bisa juga merupakan sesuatu yang memberi keraguan, ketidak pastian atau sesuatu yang sulit dimengerti. Pemecahan masalah bisa dianggap sebagai suatu proses pengaplikasian pengetahuan yang dimiliki, hingga pengetahuan

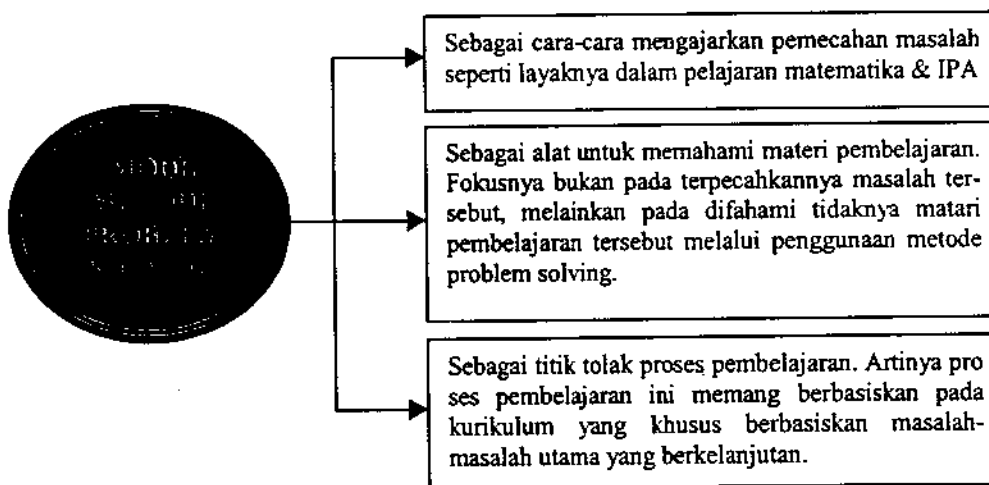
baru. Maka pemecahan masalah merupakan suatu bentuk pembelajaran (Killen, 1998: 106).

Masih menurut Killen dalam bukunya *Effective Teaching Strategies* (1998: 105), ia membedakan penggunaan metode Problem Solving ke dalam tiga katagori; *Pertama*, ada yang berupa mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah, *kedua*, mengajarkan siswa dengan menggunakan pemecahan masalah, dan *ketiga*, sistem pembelajaran yang berbasiskan masalah.

Dua katagori pertama, jelas sangat berhubungan erat, artinya jika seorang guru ingin menggunakan problem solving sebagai suatu strategi pembelajaran, maka dipastikan guru tersebut harus mengajari siswanya cara-cara memecahkan masalah tersebut. Karenanya kedudukan katagori pertama, mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah, kedudukannya memang lebih rendah dibandingkan dengan katagori kedua, penggunaan problem solving sebagai suatu strategi pembelajaran. Katagori pertama, seringkali dipergunakan dalam pembelajaran matematika dan IPA. Misalnya bagaimana cara siswa tersebut mengaplikasikan rumus-rumus IPA ke dalam soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Atau bagaimana cara siswa tersebut membuat rumus-rumus turunan dalam memecahkan soal-soal matematika dan sebagainya. Sedangkan katagori yang kedua, merupakan suatu teknik yang benar-benar memanfaatkan suatu masalah sebagai sarana untuk membantu siswa memahami atau mendalami pelajaran yang mereka pelajari. Perbedaannya memang hanya pada penekanannya. Cara pertama tekanannya pada pemecahan masalah itu sendiri, sedangkan katagori kedua penekanannya ada pada pembelajaran suatu subjek didik melalui pemecahan masalah. Adapun katagori ketiga, proses pembelajaran itu

justru dimulai dan berbasiskan pada keterampilan memecahkan permasalahan permasalahan yang ada, dengan masalah-masalah utama yang sifatnya berkelanjutan. Katagori ketiga ini hanya dimungkinkan pada kurikulum yang memang disusun berbasiskan pada masalah-masalah utama yang bersifat berkelanjutan. Katagori yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah katagori kedua, dimana metode pemecahan masalah itu hanya digunakan sebagai salah satu alat analisis dalam memahami materi pembelajaran. Sekalipun demikian, tidak berarti cara-cara pemecahan masalah itu sendiri tidak diajarkan sama sekali, karena sangat mustahil jika kita mencoba membelajarkan siswa melalui penggunaan metode pemecahan masalah (problem solving), sementara cara-cara pemecahan masalahnya sendiri tidak diajarkan kepada siswa, sekalipun menurut hemat penulis, cara-cara mengajarkan pemecahan masalah itu akan sangat berbeda antara di mata pelajaran IPA, khususnya matematika dan Fisika dengan mata pelajaran di IPS umumnya. Jadi katagori yang kedua ini tetap lebih luas cakupannya dari pada katagori kesatu.

Secara umum gambaran tiga model pemecahan masalah itu adalah sebagai berikut :



**Gambar.10.** Tiga model pemecahan masalah menurut Roy Killen (1998: 105)

Dalam menggunakan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran,

Killen (1998: 107) mengatakan sebagai berikut :

Seorang guru harus menjelaskan kepada siswanya kenapa kita ingin mereka untuk mempelajarinya. Kenapa kita menggunakan masalah sebagai cara untuk keberlangsungan proses pembelajaran, dan interaksi macam\*apa yang kita harapkan dari mereka selama proses pembelajaran itu berlangsung. Melalui proses pembelajaran ini, fokusnya adalah pengembangan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang akan kita berikan, bukannya penemuan jawaban untuk masalah itu sendiri. Hal ini bisa dicapai dengan baik jika guru memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada siswanya untuk mengembangkan pemahaman mereka.

Menurut Owen dan Sweller (Killen, 1998: 107), Ketika pemecahan masalah digunakan sebagai sebuah strategi pembelajaran, penekanannya harus pada siswa yang mempelajari mata pelajaran, bukannya hanya belajar untuk memecahkan masalah. Hal ini begitu penting, karena jika kita hanya mengajarkan siswa bagaimana cara memecahkan masalah, maka mereka hanya mempelajari sedikit pengetahuan, atau sekedar tahu langkah-langkah yang harus diikuti untuk memecahkan masalah tertentu saja. Hal ini bukanlah cara yang efektif dalam membantu siswa belajar, karena banyak bukti yang menunjukkan bahwa siswa yang diajarkan memecahkan masalah dengan pendekatan "sarana sebagai tujuan akhir" hanya akan mendapat sedikit pengetahuan.

Schuell (Killen, 1998: 107) bahkan menyatakan bahwa ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pemecahan masalah sangat tergantung pada pengetahuan spesifik, yakni "kemampuan untuk memecahkan masalah dalam bidang-bidang tertentu sangat bergantung pada pengetahuan spesifik yang berhubungan dengan bidang itu, sehingga kecil kemungkinan untuk bisa mengalihkan kemampuan untuk

memecahkan masalah dari satu bidang ke bidang lain". Pandangan ini memang bertentangan dengan faham tradisional yang menyebutkan bahwa strategi pemecahan masalah bisa digeneralisir untuk bidang ilmu yang berbeda.

Dari pendapat Schuell di atas, jelas bagi kita bahwa sekalipun siswa-siswa di tingkat SMU ini mereka juga diajari cara-cara memecahkan masalah oleh guru-guru matematika maupun IPA, namun untuk memecahkan masalah-masalah sosial khususnya mata pelajaran PPKn yang erat kaitannya dengan masalah-masalah sosial politik kenegaraan, sangat berbeda kasus dan cara penanganannya, mereka tetap membutuhkan pengetahuan yang spesifik. Untuk itulah sudah seharusnya jika dalam pembelajaran PPKn-pun metode pemecahan masalah itu tetap dipergunakan sebagai sebuah strategi pembelajaran untuk membuat siswa lebih faham lagi secara mendalam terhadap materi pembelajaran yang sedang kita berikan.

Secara formal, metode ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai sebuah metode yang dapat dipergunakan dalam sebuah proses pembelajaran. Sekalipun dalam praktek, metode ceramah dan ekspositori itu masih tetap mendominasi sejak dulu sampai sekarang. Hal ini telah digambarkan oleh Somantri (2001: 304) dalam bukunya sebagai berikut :

Dalam kurikulum SD-SMP-SMA 1968, masalah berpikir kritis, kreatif, partisipasi dinamis dan *problem solving* sudah ditetapkan untuk digunakan oleh guru-guru. Walaupun sudah ditetapkan, sampai sekarang metode tradisional itu masih tetap dilakukan. Faktor-faktor yang menyebabkan dipertahankannya metode tradisional itu diantaranya ialah : (a) ujian akhir biasanya menanyakan hafalan; (b) buku civics (PPKn) isinya sangat dipengaruhi oleh essentialisme-verbalisme; (c) indoktrinasi, *ground covering technique* dan yang sejenisnya adalah yang paling gampang; (d) kurangnya kegiatan-kegiatan penulisan ilmiah mengenai metode,



sehingga penyebaran prinsip-prinsip metode yang tercantum dalam rencana pendidikan, sulit untuk dijalankan.

Lalu apa sebenarnya kegunaan metode problem solving itu dalam pembelajaran PPKn ? Sejalan dengan manfaat metode inkuiri, maka menurut Djahiri (1983: 133) metode pemecahan masalah ini berguna pula untuk :

1. Mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan, serta mengambil keputusan secara objektif dan mandiri.
2. Mengembangkan kemampuan berfikir para siswa. Anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berfikir akan lahir bila pengetahuan makin bertambah, kiranya kurang dapat dibenarkan dalam IPS. Proses berfikir terdiri dari serentetan keterampilan (mengumpulkan informasi/data, membaca data dan lain-lain) yang penerapannya membutuhkan latihan serta pembiasaan/pembakuan.
3. Melalui inkuiri/problem solving, kemampuan berfikir tadi diproses dalam situasi/keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa serta dalam berbagai macam ragam alternatif.
4. Membina pengembangan sikap perasaan (ingin tahu lebih jauh) dan cara berfikir obyektif-mandiri, kritis-analitis, baik secara individual maupun kelompok...

Kegunaan-kegunaan metode problem solving di atas baru dapat kita capai dengan sempurna jika guru mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya penggunaan metode problem solving tersebut. Lalu bagaimanakah yang dimaksud dengan iklim yang kondusif itu ? Jarolimiek dalam Djahiri (1983: 132) memberikan pedoman/rambu-rambu untuk menciptakan iklim yang kondusif

tersebut. Diantaranya, ada yang bersifat tuntutan individual maupun kelompok.

Tuntutan yang bersifat individual diantaranya adalah :

1. Berikan kesempatan kepada siswa anda untuk merumuskan sesuatu dalam bahasa dan fikirannya sendiri.
2. Berikan kesempatan kepada mereka mencari jalannya sendiri dalam menempuh pemecahan yang telah disepakati bersama/oleh yang bersangkutan.
3. Berikan hak mengemukakan sesuatu dalam berbagai cara serta hak berbuat/melakukan kesalahan, dan kesalahan ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai pengalaman ke arah mencari perbaikan.
4. Binalah situasi kelas/kelompok yang memungkinkan siswa mengemukakan pendapat/jawabannya sendiri.
5. Sediakan waktu, peralatan serta pertolongan secukupnya (secara wajar).
6. Doronglah agar siswa mengemukakan pendapat, hipotesa, pemecahan dan kesimpulannya sendiri dalam berbagai variasi dan alternatif.
7. Berikan kesempatan kepada siswa mengembangkan cara pola kerja sendiri.

Sedangkan tuntutan yang bersifat kelompok/kelas yang dapat menciptakan iklim inkuiri/problem solving tersebut adalah :

1. Kelas diarahkan kepada pokok permasalahan yang telah jelas rumusannya, patokan/cara, serta arah tujuannya.
2. Agar difahami bahwa inkuiri/problem solving adalah pengembangan kemampuan membuat perkiraan serta proses berfikir. Peranan pertanyaan dan kemampuan mengemukakan pertanyaan (teknik bertanya) dari guru akan sangat menentukan keberhasilan inkuiri.

3. Hendaknya diberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengemukakan berbagai kemungkinan (alternatif) dalam bertanya atau menjawab.
4. Bahwa cara menjawab dapat diutarakan dengan berbagai cara sepanjang hal ini mengenai permasalahan yang sedang diinkuiri/problem solving.
5. Bahwa pada umumnya inkuiri/problem solving adalah menggali nilai-nilai atau sikap, maka hargailah sistem kepercayaan/nilai dan sikap siswa-siswa anda.
6. Guru hendaknya menjaga diri untuk tidak menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan.
7. Usahakan selalu jawaban bersifat merata dan komparatif (dapat diperbandingkan dengan yang lainnya).

Metode inkuiri dan problem solving dalam hal ini memang tidak dibedakan terutama dalam hal pendekatan maupun langkah-langkahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Djahiri (1983: 133) dalam bukunya Pengajaran Studi Sosial/IPS sebagai berikut :

... Sejumlah sarjana tidak membedakan pendekatan maupun langkah dari kedua metode tersebut (inkuiri dan problem solving). Namun Throstone dalam bukunya 'Scalling attitude' mengemukakan bahwa hal yang paling penting dalam inkuiri adalah; kita/siswa mencari sesuatu sampai tingkat 'yakin', tingkatan mana dicapai melalui dukungan data, analisa, interpretasi serta pembuktiannya. Bahkan dalam inkuiri akan dicapai tingkat pencarian alternatif (pilihan kemungkinan) pemecahan masalah tersebut.

Problem solving lebih menitik beratkan kepada terpecahkan sesuatu masalah yang menurut perkiraan rasio – logis, benar atau tepat. Perbedaan lain ialah tingkat dan cara kerjanya. Dalam inkuiri tingkatannya lebih tinggi serta komplikatif.

Sedangkan menurut Hasan dalam bukunya Pendidikan Ilmu Sosial (1996: 233), inti dari suatu pemecahan masalah adalah keputusan terbaik menyelesaikan masalah

yang ada. Oleh karena itu menurutnya, dalam pemecahan masalah, kemampuan mengidentifikasi masalah serta dimensi masalah adalah kegiatan pertama yang sangat penting. Kegagalan dalam menentukan masalah dan menguraikan dimensi masalah menurutnya akan mengakibatkan kegagalan dalam upaya mencari penyelesaiannya.

Dalam mata pelajaran PPKn, metode problem solving ini sangat dibutuhkan untuk membina siswa memahami materi pembelajaran dan keterampilan berfikir untuk memecahkan suatu permasalahan. Namun seperti kata Somantri (2001: 308), banyak juga orang yang berpendapat bahwa mengajar civics/PPKn sama dengan indoktrinasi (apalagi ketika masih ada P4). Namun menurutnya, hal ini bukan hanya dalam PPKn, melainkan juga dalam mengajarkan sejarah dan ekonomi yang gurugurunya menekankan pada ceramah dan membaca isi buku seperti dilakukan sekarang ini dapat dikelompokkan ke dalam indoktrinasi. Sebagai teknik, menurut Numan memang metode indoktrinasi tidak bisa dihindarkan di negara manapun, juga pada saat-saat tertentu dan bahan tertentu. Untuk apa yang dinamakan "*The Great Ought*", sadar atau tidak, masing-masing bangsa telah melakukan indoktrinasi, karena bagaimanapun juga setiap negara memerlukan persyaratan objektif bagi bangsa dan negaranya. Di Indonesia menurutnya, persyaratan dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, UU, ketetapan badan legislatif dan pemerintah dan peraturan perundangan lainnya. Karenanya meminjam istilah Johnson dalam Numan (2001: 308), guru memang harus pandai memilih mana yang termasuk *voidable indoctrination* dan mana yang *unavoidable indoctrination*. *Voidable indoctrination* sama dengan propaganda, dimana guru disuruh untuk membacakan isi suatu dokumen



resmi atau bahan pelajaran yang telah ditetapkan apa adanya tanpa mempertanyakannya. Sedangkan *Unavoidable indoctrination* adalah informasi yang sukar untuk dihindarkan, karena bahan-bahan itu dianggap benar. Namun walaupun sukar untuk dihindarkan, akan tetapi guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi bahan pelajaran secara kritis, analitis dan reflektif, agar nilai-nilai "*The Great Ought*" itu betul-betul difahami dan diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa agar kepercayaan yang mereka terima itu menjadi kepercayaan yang teruji.

Ada beberapa langkah yang harus dilewati ketika kita menggunakan problem solving sebagai sebuah strategi pembelajaran. Langkah-langkah yang dimaksud menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Hasan (1996: 233) :
  - a. Identifikasi Masalah.
  - b. Pengembangan alternatif.
  - c. Pengumpulan data untuk menguji alternatif.
  - d. Pengujian alternatif.
  - e. Pengambilan Keputusan.
2. Larkin dalam Oemar dan Waney (1980: 6)
  - a. Definisi Permasalahan
  - b. Identifikasi alternatif
  - c. Analisa Akibat
  - d. Penerapan Kriteria
  - e. Pengambilan Keputusan
3. Senesh dalam Oemar dan Waney (1980: 6)
  - a. Fase Motivasi
  - b. Fase Pengembangan, yang meliputi;
    - menemukan gejala permasalahan
    - mempelajari aspek-aspek permasalahan
    - definisi permasalahan
    - menentukan ruang lingkup permasalahan
    - menganalisa sebab-sebab permasalahan
    - pemecahan masalah.
  - c. Fase Kulminasi
4. Dewey dalam Djahiri (1983: 137)

- a. Merumuskan permasalahan
  - b. Menelaah permasalahan tersebut
  - c. Membuat/merumuskan hipotesa
  - d. Menghimpun, mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesa
  - e. Pembuktian hipotesa
  - f. Menentukan pilihan pemecahan/keputusan.
5. Menurut Schunke (1988: 91) :
1. Penentuan Masalah, terdiri dari :
    - a. memaparkan problem secara spesifik untuk dipelajari dan dibuat keputusan.
    - b. Membuat pertanyaan untuk dijawab.
    - c. Mengumpulkan informasi untuk membuat gambaran umum masalah.
    - d. Menetapkan langkah permasalahan.
  2. Menyiapkan Pengumpulan Data, terdiri dari :
    - a. Penentuan sumber-sumber yang tersedia untuk menjawab pertanyaan secara spesifik.
    - b. Menentukan sumber-sumber yang tepat untuk satu maksud dan tujuan.
      - mengingat sumber-sumber yang valid
      - memilih sumber-sumber ekonomi
  3. Pengumpulan Data, menerapkan kecakapan untuk sumber-sumber spesifik (menggunakan sumber-sumber spesifik khusus)
  4. Memeriksa (meneliti), Analisis & Evaluasi Data, terdiri dari :
    - Menghasilkan gambaran yang lebih luas/mendalam dari sumber data yang ada.
    - Penentuan jawaban dari pertanyaan yang timbul.
    - Meneliti data untuk menyusun katagorisasi
    - Penentuan data yang muncul dan terpakai.
6. Menurut Schunke and Hoffman dalam Schunke (1988: 87) :
- Memaparkan ada tiga model pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam pendidikan IPS dengan langkah-langkahnya sendiri. Jika digambarkan, langkah-langkah tersebut adalah seperti tergambar dalam **Gambar 11.** di bawah ini :

DISKRIPSI	DESKRIPSI	PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Penentuan Masalah	1. Penentuan Masalah	1. Penentuan Masalah
2. Rencana Pengumpulan Data	2. Rencana Pengumpulan Data	2. Rencana melahirkan alternatif dan konsekwensinya (akibatnya).
3. Pengumpulan Data	3. Pengumpulan Data.	3. Melahirkan alternatif-alternatif dan konsekwensinya (meneliti).
4. Memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi data.	4. Memeriksa, menganalisis, dan mengevaluasi data.	4. Memeriksa, menganalisis,
5. Sintesis.	5. Menerima atau menolak hipotesis.	
	6. Generalisasi	

		dan mengevaluasi data & akibat-akibatnya. 5. Memilih struktur nilai yang selaras. 6. Tindakan.
--	--	--

Dari contoh langkah-langkah problem solving yang dikemukakan di atas, penulis lebih cenderung untuk mengambil langkah-langkah yang dikemukakan oleh John Dewey. Kenapa demikian, karena rumusan langkah-langkah problem solving menurut John Dewey nampaknya lebih simpel untuk dipergunakan di level SMTA kelas satu. Apalagi metode problem solving yang digunakan penulis seperti telah dikemukakan di muka, tidak bertujuan untuk mengajarkan cara-cara pemecahan masalah semata-mata, apalagi menjadikan proses pembelajaran yang berbasiskan problem solving melainkan hanya menjadikan alat – metode problem solving ini - sebagai salah satu jalan bagi siswa pembelajar agar dapat lebih dalam lagi memahami materi pembelajaran yang sedang diberikan oleh gurunya melalui strategi pembelajaran metode problem solving tersebut.

#### **G. Pentingnya Unsur Motivasi dalam Proses Pembelajaran PPKn**

Mustakin (2001: 77) dalam bukunya Psikologi Pendidikan, mengartikan motivasi sebagai *keadaan jiwa individu yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan guna mencapai suatu tujuan*. Mc Donald dalam Soemanto (207: 203) mengartikan motivasi sebagai *suatu perubahan tenaga di dalam diri/pribadi seseorang yang ditandai oleh dorongan afektif dan reaksi-reaksi dalam usaha mencapai tujuan*. Dalam definisi ini masih menurut Wasty Soemanto mengandung

pada ia tidak termotivasi sama sekali. Ia akan sangat antusias dan penuh perhatian dalam belajarnya. Bahkan ia akan turut terlibat dalam proses pembelajaran tersebut dengan cara-cara memberikan sebanyak mungkin pertanyaan, jawaban, komentar, usulan dan sebagainya.

Kita semua sudah tahu, bahwa isi materi dari PPKn, tidak semata-mata teks book saja, melainkan juga ada proses penanaman nilai-nilai kejuangan, nilai – moral dan norma-norma budaya serta hukum, serta masalah-masalah politik kenegaraan mutakhir yang perlu diketahui siswa. Karenanya, tanpa motivasi yang kuat, seorang siswa pasti tidak akan mau mengikuti perkembangan jaman seperti berita-berita di media massa dalam kaitannya dengan masalah-masalah politik kenegaraan kekinian.

Untuk membangkitkan motivasi yang kuat itulah kemudian para siswa dicoba diberikan sebuah stimulus tentang isu-isu kontroversial yang sejalan dengan Pokok Bahasan yang akan diberikan, serta sesuai dengan tingkat perkembangan pemikirannya.

#### **H. Stimulus Isu-isu Kontroversial Sebagai Salah Satu Media Pendidikan Untuk Meningkatkan Motivasi Siswa Dalam Pembelajaran PPKn**

Pengertian isu kontroversial menurut Muessig dalam Hasan (1996: 202) adalah *sesuatu yang mudah diterima oleh seseorang atau kelompok, tetapi juga mudah ditolak oleh orang atau kelompok lain*. Sedangkan menurut Stradling, dkk. dalam bukunya *Teaching Controversial Issues* (1984: 2) mengartikan isu kontroversial itu sebagai : *In a sense an issue is controversial 'if numbers of people are observed to disagree about statements and assertions made in connection with the issue'*.



Masalah isu kontroversial memang sangat penting untuk diajarkan dalam pendidikan IPS, termasuk didalamnya adalah PPKn. Kenapa demikian ? Karena melalui pembelajaran isu kontroversial, daya nalar dan daya fikir siswa jadi lebih terlatih. Bukan hanya itu, bahkan siswa pun akan belajar bagaimana cara mengemukakan pendapat dengan benar, belajar untuk berbeda pendapat dengan teman-temannya, belajar untuk mempertahankan pendapat yang diyakini kebenarannya, belajar untuk menghargai pendapat orang lain yang bersebrangan dengannya, dan sebagainya. Stardling dkk. (1984: 3) menyatakan bahwa :

Some teachers include controversial issues in their teaching because they are topical and may be directly relevant to students lives, or because they are major social, political, economic or moral problems of our time and consequently aspects of life which students ought to know something about.

Sejalan dengan itu, Hasan dalam bukunya Pendidikan Ilmu Sosial (1996: 202)

mengatakan sebagai berikut :

Pengajaran melalui isu kontroversial dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial dianggap sangat penting. Pertama, isu kontroversial merupakan sesuatu yang dapat dijumpai dalam banyak kasus mengenai teori atau pendapat dalam ilmu-ilmu sosial. Teori-teori yang dibangun berdasarkan data lapangan tertentu seringkali dianggap tidak mewakili kenyataan lapangan di berbagai tempat tertentu. Kenyataan yang demikian selalu hidup dalam ilmu-ilmu sosial, dan oleh karena itu isu kontroversial adalah sesuatu yang alamiah dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial.... Keuntungan lain yang dapat diperoleh melalui pengajaran dengan menggunakan isu kontroversial ialah melalui pendapat yang berbeda, orang dapat mengembangkan pendapat baru yang lebih baik. Disini terjadi proses analogis dan sintesis dalam berfikir. Atas dasar perbedaan pendapat itu, dinamika kehidupan akademik dan sosial terjamin dengan baik. Siswa yang terbiasa dengan berbagai pandangan yang berbeda akan dapat menempatkan dirinya dan menyumbangkan pemikirannya sebagai anggota masyarakat secara baik. Perbedaan pendapat yang sering mereka alami di kelas, akan pula menjadi dasar bagi mereka untuk terbiasa

dengan kondisi semacam itu, sehingga ketika mereka menjadi anggota masyarakat, mereka tidak lagi merasa terasing.

Dalam PPKn, bahan-bahan yang dijadikan untuk isu kontroversial bisa sangat luas sekali, karena ia bisa mencakup masalah-masalah sosial-budaya, ekonomi, hukum dan politik-kenegaraan. Isu-isu kontroversial yang dipilih menurut Hamid Hasan (1996: 203) dapat diambil dari suatu sumber yang resmi dan beredar secara umum. Tetapi guru dapat pula mengembangkan suatu bahan yang memuat isu kontroversial berdasarkan apa yang sudah ada dalam masyarakat. Dengan cara demikian, sesuatu yang tidak jelas dapat dikemukakan sedemikian rupa sehingga ia segera dapat menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda. Meskipun demikian, isu-isu yang dipergunakan itu tetap harus sejalan dengan pokok bahasan yang akan diberikan agar tidak mengganggu proses pembelajaran secara keseluruhan, dan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didiknya. Sebab jika tidak, maka siswa akan sulit mencerna isu tersebut yang pada akhirnya target pembelajaran tidak akan tercapai sebagaimana mestinya.

Hal yang harus difahami dalam pemecahan masalah isu-isu kontroversial ini adalah bahwa hasil akhir dari pemecahan masalah isu kontroversial ini tidaklah selalu harus ada kesamaan pendapat, ia bisa saja tetap dibiarkan berbeda pendapat sejauh masing-masing pendapat itu bisa mengajukan argumennya dengan jelas dan benar, meskipun dipandang dari sudut yang berbeda. Kembali Hasan (1996: 204) menegaskan hal ini dalam bukunya dengan menyatakan bahwa :

Setiap orang dapat menjadi pembela atau juga penyerang suatu pendapat. Penjajagan yang dilakukan ini untuk kemudian memperlihatkan kekuatan dan kelemahan pendapat masing-masing. Kegiatan kelas tidak perlu diarahkan untuk mendapatkan kesepakatan-kesepa-

katan. Jika terjadi ketidak sepakatan, guru jangan memaksa adanya kesepakatan. Apa yang dapat dilakukan guru bersama siswa adalah menarik kesimpulan mengenai kesamaan dan perbedaan pendapat yang ada, kelemahan dan keunggulan masing-masing pendapat.

Umumnya ketidak sepakatan/ketidak setujuan terhadap suatu persoalan yang kontroversial itu menurut Stradling dkk. (1984: 2) adalah karena kurangnya bukti-bukti tentang persoalan tersebut. Namun menurutnya, tidak mustahil justru persoalan itu menjadi kontroversial, karena tidak cukup dapat diselesaikan dengan adanya bukti-bukti. Hal ini biasanya jika sudah menyangkut nilai-nilai yang tidak bisa diterima secara universal. Lebih jelasnya ia menyatakan sebagai berikut :

In a sense issue is controversial 'if numbers of people are observed to disagree about statements and assertions made in connection with the issue'. They may not be able to agree because there is insufficient evidence to settle the matter - a state of affairs - which is commonplace in all academic disciplines. Such issues cease to be controversial once sufficient evidence is forthcoming. Thus few people would expect geographers to give credence to the claims of the flat Earth Society. But other issues are controversial precisely because they are not capable of being settled by appeal to evidence. These are issues where the disagreement centres on matters of value judgement. The major political, social and economic issues of our time or of any previous era tend to be of this type. ...they are issues 'for which society has not found a solution that can be universally or almost universally accepted', and each of the proposed ways of dealing with them proves objectionable to a significant section of the community and arouses protest.

It is this kind of issue, arising out of conflict of values, which confronts the teacher with the most fundamental pedagogic problems. In subsequent chapters we shall therefore focus primarily on issues such as nuclear disarmament, sexism..... which do embody major conflicts of values in our society and which also present teachers with considerable problems in the classroom.

Seperti yang sudah dituliskan dalam judul bahasan di atas, stimulus isu-isu kontroversial ini hanyalah salah satu media pendidikan dari sekian banyak media

pendidikan yang tersedia, untuk dapat meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran PPKn.

Apa itu yang dimaksud dengan media pendidikan ? Ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ahli media pendidikan. Direktorat Sarana Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional dalam makalahnya (1999: 20) telah mengutip beberapa definisi tersebut seperti menurut :

- 1) Association For Education Communication and Technology (AECT) :  
Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan.
- 2) GAGNE :  
Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar.
- 3) BRIGGS  
Media adalah alat untuk memberikan rangsangan bagi siswa supaya terjadi proses belajar.
- 3) WONG  
Media adalah alat atau mekanisme untuk menyalurkan pesan ke indra peserta didik.

Bahri dan Zain (1995: 136) mengartikan media pendidikan secara harfiah sebagai “perantara atau pengantar”, dengan demikian menurutnya media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Sedangkan Hamalik (1977: 23) mengartikan media sebagai *Alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah*. Ada beberapa istilah lain selain media yang biasa dipergunakan, seperti istilah; peragaan, alat peraga, komunikasi peragaan, teaching material, instructional material, audio-visual aids dan sebagainya.

Dalam proses pembelajaran, kehadiran media pendidikan mempunyai arti yang cukup penting karena mempunyai beberapa fungsi; misalnya dalam kegiatan tersebut,

ketidak jelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara, kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media, dapat memperjelas konsep yang masih abstrak bagi siswa, menimbulkan rangsangan belajar, meningkatkan minat belajar, memperbaiki persepsi siswa terhadap sesuatu, mensimulasikan situasi yang sebenarnya, dapat menggambarkan hubungan antar konsep, menggantikan situasi yang berbahaya, dan dapat mempersingkat waktu. Bahkan mediapun dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Dengan demikian, anak didik jadi lebih mudah mencerna bahan dari pada tanpa bantuan media.

Dilihat dari fungsi-fungsi media pendidikan di atas, maka sebenarnya kegunaan media pendidikan ini secara umum hanya dua, yakni; memperjelas penyajian dan mengatasi keterbatasan. Apakah keterbatasan karena objeknya terlalu besar/kecil, objeknya yang bergerak terlalu lambat/cepat, objek yang terlalu kompleks, konsep yang terlalu luas, maupun untuk menerangkan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu.

Secara umum, Hamalik (1977: 22) memberikan ciri-ciri umum dari media pendidikan seperti berikut :

- a. Media pendidikan identik artinya dengan keperagaan yang berasal dari kata "raga", artinya suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar dan yang dapat diamati melalui panca indra kita.
- b. Tekanan utama, terletak pada benda atau hal-hal yang bisa dilihat dan di dengar.

- c. Media pendidikan digunakan dalam rangka hubungan (komunikasi) dalam pembelajaran antara guru dan siswa
- d. Media pendidikan adalah semacam alat bantu belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
- e. Berdasarkan point (c) dan (d), maka pada dasarnya media pendidikan merupakan suatu “perantara” (medium/media) dan digunakan dalam rangka pendidikan.
- f. Media pendidikan mengandung aspek-aspek; sebagai alat dan sebagai teknik, yang sangat erat kaitannya dengan metode mengajar.

Menurut Encyclopedia of Educational Research dalam Hamalik (1977: 27), media pendidikan mempunyai beberapa nilai manfaat jika digunakan dengan benar. Nilai manfaat itu antara lain :

- a. Meletakkan dasar-dasar yang kongkrit untuk berfikir, dan oleh karena itu akan mengurangi verbalisme.
- b. *Memperbesar perhatian siswa.*
- c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, dan oleh karena itu membuat pelajaran lebih menetap.
- d. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa.
- e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, hal ini terutama terdapat dalam gambar hidup.
- f. Membantu tumbuhnya pengertian dan dengan demikian membantu perkembangan kemampuan berbahasa.

- g. Memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, serta membantu berkembangnya efisiensi yang lebih mendalam serta keragaman yang lebih banyak dalam belajar.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa stimulus isu kontroversial yang berfungsi sebagai salah satu media pendidikan, akan mempermudah siswa dalam belajar dan membantu memahami materi pembelajaran, serta dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajarnya. Hanya saja fungsi media itu bisa dikatakan efektif dan efisien jika media tersebut cocok dengan pokok bahasan yang dibuatnya atau dengan materi yang akan disampaikan.

----- oOo -----